



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH
2. Jabatan : HAKIM KONSTITUSI
3. NHK : 741423

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.583.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.055.000.000
2. Tanah Seluas 13872 m2 di KAB / KOTA KUALA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , WARISAN Rp. 6.200.000
4. Tanah Seluas 2760 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 580.000.000
5. Tanah Seluas 2400 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 505.000.000
6. Tanah Seluas 13872 m2 di KAB / KOTA KUALA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000
7. Tanah Seluas 1250 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 390.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF 100 LD SUPRA FIT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000
2. MOTOR, HONDA NF 11 T11 COI MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.400.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000



4. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2G M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	83.242.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.574.774.605
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.631.216.605
III. HUTANG	Rp.	193.550.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.437.666.605

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.